

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dana Desa merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir Tulungagung. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

<b>Kecamatan</b>		<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Pertumbuhan Penduduk</b>
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
010	Besuki	38.411	0,89
020	Bandung	48.185	1,14
030	Pakel	53.546	0,88
040	Campurdarat	57.621	0,52
050	Tanggunggunung	25.961	0,70
060	Kalidawir	75.209	1,38
070	Pucanglaban	26.146	1,42
080	Rejotangan	81.247	1,21
090	Ngunut	83.708	0,83
100	Sumbergempol	71.701	0,95
110	Boyolangu	83.708	0,73
120	Tulungagung	65.828	0,03
130	Kedungwaru	95.061	0,80
140	Ngantru	57.667	0,79
150	Karangrejo	43.754	0,81
160	Kauman	51.882	0,42
170	Gondang	58.960	0,75
180	Pagerwojo	31.435	0,35
190	Sendang	47.129	0,76
	Kab. Tulungagung	1. 096.588	0,81

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung (Hasil Proyeksi Penduduk)

Kebijakan desa meliputi serangkaian langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Pesisir Tulungagung, kebijakan desa yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa. Kebijakan yang tepat dapat mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan aksesibilitas, serta perlindungan lingkungan di daerah pesisir.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pesisir Tulungagung. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, irigasi, jaringan listrik, dan akses komunikasi yang memadai, dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Dengan adanya infrastruktur yang baik, masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan.

Melalui studi kasus Desa Pucanglaban dan Desa Keboireng di Kabupaten Tulungagung, dapat dianalisis bagaimana kontribusi dana desa, kebijakan desa, dan kualitas pembangunan infrastruktur telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir tersebut. Analisis ini dapat meliputi evaluasi penggunaan dana desa, efektivitas kebijakan desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dampak infrastruktur yang dibangun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

**Tabel 1. 2**  
**Keluarga Sejahtera di rinci Menurut Desa dan Klasifikasinya Kecamatan Pucanglaban**

Desa	Pra Sejahtera	Sejahtera			
		1	2	3	3 +
Panggungkalak	171	195	80	22	3
Kalidawe	138	127	96	40	4
Pucanglaban	376	379	762	154	19
Sumberbendo	270	282	170	77	4
Kaligentong	93	252	137	131	4
Manding	94	126	170	157	8
Panggunguni	172	328	217	169	13
Sumberdadap	281	414	495	272	13
Demuk	368	458	1 425	366	37
<b>Jumlah</b>	<b>1 963</b>	<b>2 561</b>	<b>3 552</b>	<b>1 388</b>	<b>105</b>

Sumber : Kecamatan Pucanglaban Dalam Angka, 2017

**Tabel 1. 3**  
**Keluarga Sejahtera di rinci Menurut Desa dan Klasifikasinya Kecamatan Besuki**

Desa	Pra Sejahtera	Sejahtera 1	Sejahtera 2++
Sedayugunung	62	38	275
Keboireng	120	121	863
Besuki	136	143	1 022
Besole	259	288	2 616
Tanggulwelahan	164	198	1 337
Tanggulturus	98	114	1 016
Tanggulkundung	101	147	1 188
Wateskroyo	92	121	795
Siyotobagus	102	147	780
Tulungrejo	87	138	415
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

Sumber : Kecamatan Besuki Dalam Angka, 2016

Pembangunan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hangat untuk dibicarakan, hal tersebut dikarenakan adanya dilema antara memacu pertumbuhan ekonomi atau mengejar pemerataan pembangunan. Terlebih lagi, selama hampir tujuh dekade ini pembangunan Indonesia cenderung *jawasentris* dan menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi adanya kesenjangan yang tinggi antara pembangunan di Pulau Jawa dengan daerah lainnya, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur

Peran dana desa bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Hal tersebut terjadi dikarenakan dana desa sangat bisa membantu pola perekonomian atau bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang pro kepada rakyat kecil. Infrastruktur sendiri bertujuan dan berguna untuk memperlancar dan membuat barang maupun jasa yang di produksi oleh masyarakat di suatu daerah semakin bertambah dan bisa memicu kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Pengelolaan dana desa ini bisa berjalan secara sehat dan strategis jika dilaksanakan dengan melibatkan aspirasi masyarakat secara langsung, hal tersebut dikarenakan rakyatlah yang menjadi sasaran dalam pertumbuhan ekonomi dan sepantasnya semua masyarakat terlibat dan mengetahui untuk

---

<sup>2</sup> Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong, “*Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemah Kabupaten Kepulauan Talaud*”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisien, Vol 18 Nomor 4 dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20951> diakses pada 29 September 2022 pukul 08.15

apa dana desa tersebut, dengan begitu maka visi desa dan masyarakat bisa sejalan untuk meningkatkan pertumbuhan daerah. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>3</sup>

Pengembangan wilayah setidaknya meliputi tiga tingkatan, yakni mikro, mezo, dan makro. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengenali kebutuhan yang mendesak dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, membantu daerah dalam rangka mencapai kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendorong pengembangan potensi daerah agar mampu mengeksport hasil industri atau pertaniannya untuk mendukung perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Pada tingkat mezo dilakukan pengembangan wilayah dengan jalan mengaitkan antar-wilayah agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan. Kawasan yang menjadi prioritas diantaranya: kawasan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, dan kawasan potensial. Selama ini desentralisasi pembangunan hanya untuk konteks daerah tertentu seperti daerah tertinggal, terbelakang

---

<sup>3</sup> Moh Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, Muhammad Agus Salim, “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Banyuwetes Kecamatan Banyuwetes Kabupaten Sampang*”, Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, Vol 6 Nomor 4 dalam <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/462> diakses pada 29 September 2022 pukul 08.45

<sup>4</sup> Raden Hady Santika, Budi Santoso, dan Hadi Mahmud, “*Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 Nomor 1 dalam <https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/57> diakses pada 29 September 2022 pukul 09.45

atau daerah dengan potensi strategis seringkali tidak disertai strategi yang tepat dan bernuasa politis, terutama jika berkaitan dengan isu keuangan.<sup>5</sup>

Proses transformasi suatu wilayah pedesaan menjadi suatu daerah *agroindustri* secara ilmiah telah banyak diulas peneliti dan akademisi dan menjadi tuntutan nyata dalam proses perkembangan modernisasi masyarakat pertanian, karena kegiatan pertanian berada di wilayah pedesaan. Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, kita harus merubah pandangan *inferior* atas wilayah ini, dan merubahnya dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang masyarakat.<sup>6</sup>

Wibowo mengungkapkan ada empat aspek umum ciri-ciri spesifik terpenting mengenai konsep *agroekosistem*. Empat aspek umum tersebut adalah: pemerataan (*equitability*), keberlanjutan (*sustainability*), kestabilan (*stability*) dan produktivitas (*productivity*). Secara sederhana, *equitability* merupakan penilaian tentang sejauh mana hasil suatu lingkungan atau sumber daya didistribusikan diantara masyarakatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jakob Oetama, "*Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 280.

<sup>6</sup> Arthur Simanjutak, "*Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Pembangunan*", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist, Vol 3 Nomor 2 dalam <https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/jsika/article/view/712> diakses pada 29 September 2022 pukul 10.15

<sup>7</sup> Kuntora Boga Andri, "*Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan*", Jurnal Inovasi, Vol 6/XVIII. [https://www.researchgate.net/profile/Kuntoro-Andri/publication/266603741\\_Perspektif\\_Pembangunan\\_Wilayah\\_Pedesaan/links/561e3f3308aef097132b376f/Perspektif-Pembangunan-Wilayah-Pedesaan.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Kuntoro-Andri/publication/266603741_Perspektif_Pembangunan_Wilayah_Pedesaan/links/561e3f3308aef097132b376f/Perspektif-Pembangunan-Wilayah-Pedesaan.pdf) diakses pada 29 September 10.20

*Sustainability* dapat diberi pengertian sebagai kemampuan sistem sumber daya yang mempertahankan produktivitasnya, walaupun menghadapi berbagai macam kendala. *Stability* merupakan ukuran tentang sejauh mana produktivitas sumber daya bebas dari keragaman yang disebabkan oleh fluktuasi faktor lingkungan tersebut. *Productivity* adalah ukuran sumber daya terhadap hasil fisik atau ekonominya. Dimasa yang akan datang, dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Prioritas dalam penggunaan dana desa adalah untuk menyelenggarakan otonomi desa agar bisa bertumbuh dan berkembang sehingga dapat dikatakan bahwa dengan dana desa akan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Penggunaan dana desa yang optimal dan efisien dalam pembangunan akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat yang mana secara langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.4**

**Dana desa di desa pucanglaban**

<b>Dana</b>	<b>Nominal</b>
<b>Pendapatan</b>	
Pendapatan asli desa	Rp 27.316.700
Dana desa (APBN)	Rp 983.007.000
Alokasi dana desa (APBD)	Rp 802.492.000
Bagi hasil pajak/retribusi	Rp 36.069.472
Bantuan Keuangan	Rp 217.376.000
Pendapatan lain-lain	Rp 6.142.731
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp 2.072.403.903</b>

**Lanjutan Tabel 1.4**

<b>Dana</b>	<b>Nominal</b>
<b>Belanja</b>	
Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 895.904.403
Pelaksanaan Pembangunan	Rp 617.866.000
Pembinaan Masyarakat	Rp 25.011.000
Pemberdayaan Masyarakat	Rp 63.622.500
Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Rp 464.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp 2.066.403.903</b>

Tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa dengan adanya dana maka pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan kapasitas desa atau capacity building, sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada

Pengarahannya komondasi perkembangan dana desa sebenarnya bisa untuk mensejahterakan atau memudahkan pada lokasi ekonomi Wisata pantai kedung tumpang masih belum memiliki akses jalan yang mudah untuk dilalui. Namun dengan akses jalan yang masih belum mudah dilalui wisatawan juga banyak yang datang untuk melihat keindahan di wisata pantai kedung tumpang,

Adanya kedung-kedung yang biasanya digunakan berenang oleh wisatawan dengan catatan jika ombak sedang besar tidak boleh berenang. Akses jalan menuju bibir pantai masih sulit untuk dilalui karena masih belum adanya anggaran untuk membenahi, jalan turun sudah menggunakan tangga sedangkan jalan untuk naik masih berpegangan dengan tali.

Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dalam menunjang untuk lebih baiknya potensi pada wisata pantai kedung tumpang

Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan. Pembangunan infrastruktur perdesaan tersebut, dengan pelibatan secara penuh masyarakat setempat dalam setiap tahapan (tahap perencanaan sampai dengan tahap operasional dan pemeliharaan).

Partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan didesa Pucanglaban kabupaten Tulungagung sangat rendah, selain itu karena desa tersebut belum terfasilitasi dengan baik di bidang infratuktur, maupun bidang kapasitas desa serta selama ini belum pernah ada yang melakukan penelitian. Di satu sisi di desa puncanglaban Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan),

Bahkan di desa lainnya penduduk harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal)

Di desa keboireng Pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar, Dengan demikian bisa kita bayangkan bagaimana perkembangan pariwisata dengan pokok kegiatan perekonominya berasal dari kegiatan ekonomi pariwisata. Sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan taraf kehidupan di suatu daerah atau negara. Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, pariwisata sering disebut sebagai passport to development (paspor untuk perkembangan), tool for regional development (alat pembangunan daerah), non-polluting industry (industry tanpa polusi), dan sebagainya.

Pengeluaran-pengeluaran para wisatawan memang meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Peningkatan pendapatan itu bisa menimbulkan akibat yang positif dan negatif. Pengembangan daerah pariwisata bisa juga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Dampak positif yang terjadi, jika pengembangannya itu merangsang perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya mereka sendiri. Dikatakan negatif jika pengembangan tadi melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih terangsang untuk mengadopsi nilai-nilai budaya asing tanpa menghayati esensinya

Peran desa sangat di butuhkan dengan danya pengeluradan dana desa, Dalam melakukan pembangunan, tentunya Desa membutuhkan sumber sumber pendapatan untuk melakukan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat. Pada tahap perencanaan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa), masyarakat akan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik di Desa. Pendapat atau usulan yang dikemukakan oleh partisipan/ masyarakat adalah pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Desa.<sup>8</sup>

**Tabel 1.5**

**Dana desa di desa keboireng**

<b>Dana</b>	<b>Nominal</b>
<b>Pendapatan</b>	
Pendapan asli desa	Rp 686.514.800
Dana desa (APBN)	Rp 1.157.140.000
Alokasi dana desa (APBD)	Rp 460.988.000
Bagi hasil pajak/retribusi	Rp 56.542.000
Bantuan Keuangan	Rp 150.000.000
Pendapatan lain-lain	Rp 9.500.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp 2.520.684.800</b>

<b>Dana</b>	<b>Nominal</b>
<b>Belanja</b>	
Penyelenggaraan pemerintah	Rp 1.211.890.800
Pelaksanaan pembangunan	Rp 360.903.000
Pembinaan kemasyarakatan	Rp 100.886.500
Pemberdayaan masyarakat	Rp 316.604.500
Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	Rp 480.400.000
<b>Total</b>	<b>Rp 2.470.684.800</b>

Tabel 1.5 dijelaskan bahwa Presiasi peningkatan infrastruktur melalui Dana Desa (DD) diberikan pada seluruh dusun melalui program partisipatif pembangunan wilayah perbaikan jalan, penggantian material

<sup>8</sup> Ernady Syaodih. "Manajemen Pembangunan", (Bandung :Refika Aditama, 2015), hlm.17

maupun pembuatan baru, program ini diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian. Dalam melakukan pembangunan, tentunya Desa membutuhkan sumber-sumber pendapatan untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap perencanaan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa), masyarakat akan memberikan usulan dan pendapat untuk semua kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik di Desa. Pendapat atau usulan yang dikemukakan oleh partisipan/masyarakat adalah pendapat yang sedikit banyak dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan di Desa.

Permasalahan sosial dan kesejahteraan rakyat adalah permasalahan yang timbul dalam masyarakat akibat suatu perubahan atau keadaan yang mengakibatkan gangguan atau kendala baik secara langsung maupun tidak langsung. Di keboireng sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan sosial, seperti kebodohan, kemiskinan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, pengangguran dan kriminalitas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, yang dituangkan dalam buku Kecamatan besuki Dalam Angka (besuki Sub Regency In Figure) pada tahun 2019.

Adanya Teori pembangunan desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai

kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.<sup>9</sup>

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Konektivitas infrastruktur wilayah dan antar wilayah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki program proyek strategis dalam bidang infrastruktur dan energi

Teori pembangunan desa menurut Rondinelli yaitu pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan prasarana jalan mempermudah masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti melakukan mobilitas, pemasaran dan mengangkut hasil pertanian masyarakat desa, biaya logistik dan biaya transportasi juga akan lebih murah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Oki, Kamilaus Konstanse, Margaretha Diana Pangastuti, and Noviana Ua. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan." *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2.1 (2020): 65-72.

<sup>10</sup> Yunelimeta. Pembangunan Pedesaan. dalam <https://eprints.undip.ac.id>, diakses pada

Hal tersebut menjadi asumsi dan membuat penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Pesisir Tulungagung (Studi Kasus Desa Pucanglaban Dan Desa Keboireng Kabupaten Tulungagung )”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana kebijakan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kontribusi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menganalisis kebijakan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menganalisis pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Sebagai tambahan informasi dan tambahan literatur seputar penggunaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan membuka wawasan bagi peneliti, bagi pembaca, pemerintah desa pada umumnya. Serta sebagai bahan masukan dan evaluasi khususnya bagi masyarakat desa agar lebih memaksimalkan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang diharapkan.
- b) Sebagai sumbangan untuk menambah wawasan keilmuan khususnya peneliti selanjutnya dalam bidang ekonomi syariah.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.<sup>11</sup>

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 592

dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

## 2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk meneladani kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari APBN yang penyalurnya melalui kas desa. Dana desa (DD) adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan dana desa menurut Saibani Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan,

---

<sup>12</sup> Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), hlm. 77

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mensejahterakan rakyat.<sup>13</sup>

### 3. Kebijakan Desa

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

### 4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan pembangunan yang berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan local yang dilakukan secara sadardan terencana dalam rangka membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan infrastruktur desa.

---

<sup>13</sup> A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hlm. 4

## 5. Kesejahteraan Masyarakat

Desentralisasi yang member kewenangan lebih luas kepada daerah, kemudian dijadikan momentum untuk memangkas anggaran dan institusi-institusi sosial dan bahkan meniadakannya sama sekali. Alasannya: pembangunan kesejahteraan sosial dianggap boros dan karenanya baru perlu dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi atau Pendapatan Asli daerah (PAD) telah tinggi. Padahal, studi di beberapa Negara menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi tidak secara otomatis dan linier berhubungan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.<sup>14</sup> Segel dan Bruzy, mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.<sup>15</sup> Midgley, memperjelas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan; Kedua, seluas apa kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Suharto, dan Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006)

<sup>15</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009)

<sup>16</sup> Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006)

## **F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai bahan acuan dalam berfikir secara sistematis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, paradigma penelitian.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: paparan data terkait kontribusi dana desa, kebijakan desa dan kualitas pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir tulungagung (studi kasus desa pucanglaban dan desa keboireng kabupaten tulungagung).

Bab V pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu.

Bab VI penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.